

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKj IP)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH
TAHUN 2017**



**DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,
DAN ASET DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
Temanggung, Februari 2018**

Kata Pengantar

Dengan mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunianya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Tahun 2017. LKjIP dimaksud merupakan bentuk komitmen nyata BPPKAD dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .

LKjIP sebagai wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja BPPKAD telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP BPPKAD.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Temanggung, Februari 2018

Kepala Badan PPKAD,

Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.

Pembina Utama Muda
NIP : 19661211 199403 1013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
.....	
Daftar Isi	ii
.....	
Daftar Tabel	iii
.....	
Daftar Bagan	iv
.....	
BAB I PENDAHULUAN	
.....	1
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
.....	
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	39
.....	
BAB IV PENUTUP	65
.....	
LAMPIRAN I	
Tabel	
LAMPIRAN II	
Tabel	

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Perda Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 52 Tahun 2017, Tentang Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung. Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah dalam bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang merupakan kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Untuk Melaksanakan Tugas Pokok Sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah.
4. Penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
5. Pengordinasian pengelolaan pendapatan, investasi daerah, dan aset daerah.
6. Penyelenggaraan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
8. Penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan anggaran belanja dan pendapatan daerah.
9. Penyelenggaraan pengelolaan pinjaman dan obligasi daerah.

10. Penyelenggaraan pengelolaan investasi dan pemberdayaan aset daerah.
11. Pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi dan pertanggungjawaban anggaran penetapan dan belanja daerah.
12. Penyusunan laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
13. Penyelenggaraan fungsi bendahara umum daerah.
14. Penyelenggaraan pembinaan, pengendalian dan evaluasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset daerah, kerugian daerah serta pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
15. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang keuangan dan aset daerah.
16. Pengarahan, pembinaan dan pengkoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan.
17. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan fungsinya.

Adapun Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh PNS sebagai berikut:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
- d. Bidang Perencanaan, Pendataan, dan Pelayanan;
- e. Bidang Pengelolaan data dan Penetapan Pendapatan;
- f. Bidang Pengendalian, & Penagihan;
- g. Bidang Penganggaran dan Perbendaharaan
- h. Bidang Pengelolaan Aset;
- i. Bidang Akuntansi & Pelaporan Keuangan, dan
- j. Kelompok jabatan fungsional.

Sementara untuk mendukung tupoksi tersebut Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung memiliki sarana dan prasarana terdiri dari:

- a. Gedung kantor;
- b. Gedung Arsip
- c. Mushola
- d. Meja kursi kerja;
- e. Meja kursi Tamu
- f. Komputer;
- g. AC;
- h. Kendaraan dinas jabatan/operasional;
- i. Telpon/Faximile/PABX
- j. Filling kabinet;
- k. Genset;
- l. TV;
- m. Laptop;
- n. Alat/perabot/pekakas lainnya;
- o. Mesin Cetak PBB;
- p. LCD & layar monitor
- q. Rak Buku/File;
- r. Brangkas;
- s. Mesin Porporasi;
- t. Mesin Validasi Karcis;
- u. Printonik SPPT PBB.
- v. Mesin penghancur kertas
- w. Lemari Arsip
- x. Kursi hadap
- y. Kursi rapat
- z. CCTV, dan
- å. Sound system.

B. Fungsi Strategis Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung dalam perkembangan kinerja menunjukkan adanya kenaikan yang signifikan pada tiap tahunnya baik pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan, maupun lain-lain yang sah.

Permasalahan umum yang dihadapi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset daerah Kabupaten Temanggung antara lain:

1. Belum diketahuinya potensi pendapatan asli daerah (PAD) yang mendekati kondisi riil.
2. Sulitnya koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan.
3. Masih adanya peraturan daerah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai perkembangan dimasyarakat sehingga perlu direviu.
4. NJOP PBB jauh dibawah harga pasar .
5. Belum terdapat perkiraan harga pasar sebagai dasar ketetapan & pengenaan BPHTB.
6. Kesadaran WP rendah terutama rumah makan, hotel, kantin dll.
7. Belum terwujudnya sistem informasi pendapatan daerah yang terintegrasi sebagai media koordinasi dan konsolidasi pendapatan dari sektor pajak dan restoran.
8. Kurangnya petugas pajak daerah baik dari segi jumlah maupun fungsinya.
9. Belum adanya SDM penilai dalam menetapkan nilai bumi dan bangunan dalam PBB-P2.
10. Perlunya revisi/perbaikan perda/perbup untuk menyesuaikan dan mengikuti perkembangan kondisi lapangan.
11. Perlunya diklat/pelatihan SDM perpajakan.
12. Software Sistem administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah masih belum terintegrasi.
13. Software SIAK Akrual yang baru masih sering terjadi kesulitan dan kesalahan dalam implementasinya dikarenakan SDM belum sepenuhnya mengimplementasikan software SIAK.

14. Masih banyaknya Perangkat Daerah yang melaporkan SPJ dan laporan keuangan terlambat.
15. Upaya mempertahankan opini WTP atas laporan keuangan pemerintahan Kabupaten Temanggung.
16. Pengelolaan Keuangan Daerah belum optimal.
17. SDM di masing-masing Perangkat Daerah yang belum sepenuhnya memahami akuntansi keuangan dan belum lancar dalam mengerjakan aplikasi penatausahaan dan aplikasi keuangan Perangkat Daerah.
18. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM serta penggunaan teknologi informasi yang belum optimal.
19. Kurangnya koordinasi intern di Perangkat Daerah dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.
20. Beberapa aset tetap rusak/hilang masih tercatat dalam daftar aset.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perjanjian Kinerja Tahun yang bersangkutan

Perjanjian Kinerja BPPKAD Kabupaten Temanggung merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari atasan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Perjanjian Kinerja tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen Kepala BPPKAD Kabupaten Temanggung dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima (Kepala BPPKAD) dan pemberi amanah (Bupati Temanggung) untuk meningkatkan Integritas, Akuntabilitas, Transparansi dan Kinerja Aparatur.
2. Menetapkan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Tahun 2017 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Bupati Temanggung untuk mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini.

Guna mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan, maka Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung telah melaksanakan program-program kegiatan:

1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

- Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah, sebesar Rp41.986.000,00

2. Program Perencanaan Pembangunan Daerah yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Penyusunan KUA dan PPAS, sebesar Rp84.999.925,00
- Penyusunan & Pelaporan Dokumen Perencanaan, sebesar Rp1.500.000,00

3. Program Pelayanan administrasi Perkantoran yang didukung dengan kegiatan sebagai berikut:

- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, sebesar Rp263.220.456,00
- Penyediaan jasa kebersihan kantor, sebesar Rp127.040.630,00
- Penyediaan alat tulis kantor, sebesar Rp34.000.000,00
- Barang cetakan dan penggandaan, sebesar Rp26.00.000,00
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, sebesar Rp7.000.000,00
- Penyediaan bahan bacaan & peraturan perundang-undangan, sebesar Rp2.880.000,00
- Penyediaan makanan dan minuman, sebesar Rp55.000.000,00
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah, sebesar Rp110.000.000,00
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah, sebesar Rp10.000.000,00

- Jasa pelayanan perkantoran, sebesar Rp199.927.340,00

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Pengadaan perlengkapan gedung kantor,sebesar Rp529.377.384,00
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, sebesar Rp35.000.000,00
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional, sebesar Rp130.000.000,00
- Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan, sebesar Rp5.400.000,00
- Pemeliharaan peralatan gedung kantor, sebesar Rp30.000.000,00
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak, sebesar Rp25.000.000,00
- Pembangunan Landscape dan sarana prasarana Penunjang Gedung DPPKAD, sebesar Rp3.325.059.000,00

5. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

- Penyusunan analisa standar belanja, sebesar Rp200.000.000,00
- Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi, sebesar Rp50.000.000,00
- Penyusunan sistem informasi keuangan daerah, sebesar Rp150.000.000,00
- Pengelolaan administrasi gaji, sebesar Rp210.000.000,00
- Monitoring dan evaluasi pendapatan asli daerah, sebesar Rp105.955.000,00
- Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi pajak daerah, sebesar Rp478.265.840,00
- Verifikasi &Pengesahan DPA, sebesar Rp50.000.000,00
- Pengelolaan keuangan daerah, sebesar Rp3.070.000.000,00
- Penyusunan perda dan perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung, sebesar Rp800.000.000,00
- Pendataan SISMIOP obyek/subyek PBB-P2, sebesar Rp548.710.950,00
- Pengelolaan Administrasi pajak daerah, sebesar Rp363.761.550,00

- Penelusuran, penagihan & penanganan permasalahan pajak daerah, sebesar Rp34.060.000,00
- Pembinaan pejabat pengurus barang, sebesar Rp300.000.000,00
- Pengelolaan barang milik daerah, sebesar Rp152.000.000,00
- Verifikasi RKA, sebesar Rp60.000.000,00
- Analisis kebutuhan dan inventarisasi barang milik daerah, sebesar Rp35.000.000,00
- Pemeliharaan SIMBADA, sebesar Rp19.999.600,00
- Lelang tanah bekas bengkok kelurahan, sebesar Rp50.000.000,00
- Reviuw perda pengelolaan keuangan daerah, sebesar Rp25.000.000,00
- Pemanfaatan dan penghapusan barang milik daerah, sebesar Rp112.997.000,00

6 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah

- Peningkatan pengelolaan keuangan daerah, sebesar Rp176.000.000,00
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, sebesar Rp57.775.000,00
- Asistensi penyusunan laporan keuangan, sebesar Rp69.521.000,00

7 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

- Penyediaan jaminan sosial tenaga kerja non PNS (PTT & tenaga kontrak), sebesar Rp.90.000.000,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017

A. Capaian kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progress kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya.

Sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala BPPKAD Tahun 2017 dan Rencana Strategis BPPKAD setidaknya terdapat 2 sasaran strategis yang harus diwujudkan pada tahun ini, Yaitu:

- a. Sasaran 1 : Meningkatnya Kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah
- b. Sasaran 2 : Meningkatnya tertib administrasi aset

Adapun untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

No	Sasaran strategis	Indikator kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	% Capaian tahun sebelumnya	% Capaian thd target akhir renstra (2018)
1	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan & pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	25	22,00	100	100	25
2		Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100%	0,87	0,99	100	100	0,87
3		Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4		Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi	9	17,26	100	100	9

		Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100 %					
5	Meningkatnya tertib administrasi aset	Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD	68	77,38	97	97	68

Secara umum capaian sebagian besar indikator pada sasaran meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dapat dicapai sesuai dengan target. Untuk capaian kinerja meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah diukur dari Indikator Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun tercapai 22% dibawah target yang telah ditetapkan yaitu 25% artinya belanja SKPD lebih efisien sehingga capaian kinerjanya 100%. Sementara itu untuk capaian kinerja meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah Rasio realisasi Pendapatan Daerah terhadap potensi Pendapatan Daerah tercapai melebihi target 100% ditargetkan 0,87 tercapai 0,99% Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah capaian, target dan realisasi dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah capaian 100% ditargetkan 9% dan realisasi 17,26% dan untuk sasaran Meningkatnya tertib administrasi aset dengan indikator kinerja Persentase tertib administrasi aset daerah di SKPD dengan capaian 97% dari target sama yaitu 68% dan terrealisasi 77,38%

1. Target dan Realisasi Kinerja tahun 2017

**CAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
TAHUN 2017**

No.	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	Target RPJMD 2013-2018	CAPAIAN KINERJA 2017			SKPD
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	%	25	25	22	100	25
2	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100%	%	0,87	0,87	0,99	100	BPPKAD
3	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100 %	%	9	9	17,26	100	BPPKAD
4	Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD	%	68	70	77,38	97	BPPKAD
5	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	BPPKAD

2. Membandingkan Realisasi Kinerja serta Capaian Tahun 2017 dengan 3 Tahun Sebelumnya (2014, 2015 dan 2016)

No	Program	Urusan/Indikator Kinerja Program	Satuan	kondisi akhir RPJMD 2013-2018	Realisasi			Realisasi s/d 2017 10=(7+8+9)	capaian s/d 2017 (%) 11 = (10/6*100)
					2014	2015	2016		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	%	25	15,00	15,00	15,00	45	180
2	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100%	%	0,87	1,24	1,09	1,09	3.42	393
3	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100 %	%	9	13,11	14,46	16,76	44.33	492
4	Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Tertib Administrasi Aset Daerah di SKPD	%	80	68	68	75	211	263
5	Pembinaan & fasilitas pengelolaan keuangan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2017 dengan Target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis organisasi

No	Program	Urusan/Indikator Kinerja Program	Satuan	Renstra SKPD	Realisasi			Realisasi s/d 2016	capaian s/d 2016 (%)
					2014	2015	2016	10=(7+8+9)	11 = (10/6*100)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun	%	25	'15,00	'15,00	22	52	4,3
1	Peningkatan & Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Target Pendapatan Asli Daerah dikali 100%	%	0,87	1,09	1,09	0,99	0,93	3,6
2	peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Jumlah Realisasi Pendapatan Asli Daerah dibagi Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah dikali 100 %	%	9	14,46	16,76	17,26	48,48	5,38

3	Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase tertib Administrasi aset daerah di SKPD	%	80	68	75	77,38	220	3,24
4	Pembinaan & fasilitas pengelolaan keuangan	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Kriteria	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

4. Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yg telah dilakukan.

Secara umum capaian sebagian besar indikator Meningkatnya Kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah dalam dua tahun berturut-turut dapat tercapai sesuai target

B Realisasi Anggaran 2017

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2017 dengan anggaran bersumber dari APBD sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Ket.
I	Program Penataan Penguasaan, pemilikan, Penggunaan & Pemanfaatan Tanah	141.986.000	37.072.680	
1	Pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah	141.986.000	37.072.680	
II	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	86.499.825	85.628.000	
1	Penyusunan KUA dan PPAS	84.999.925	84.128.000	

2	Penyusunan dan pelaporan dokumen perencanaan	1.500.000	1.500.000	
III	<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>	835.068.426	739.789.792	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	263.220.456	231.722.414	
2	Penyediaan jasa kebersihan kantor	127.040.630	125.286.833	
4	Penyediaan alat tulis kantor	34.000.000	33.660.500	
5	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	26.000.000	22.638.422	
6	Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.000.000	4.257.000	
7	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	2.880.000	2.346.000	
8	Penyediaan makanan dan minuman	55.000.000	31.798.750	
9	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	110.000.000	109.821.333	
10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	10.000.000	4.135.000	
11	Jasa pelayanan perkantoran	199.927.340	174.123.540	
IV	<i>Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur</i>	4.079.836.384	3.823.997.225	
1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	529.377.384	495.175.750	
2	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	35.000.000	25.454.000	

3	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	130.000.000	107.639.579	
4	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	5.400.000	4.800.000	
5	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30.000.000	25.422.500	
6	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional mantri pajak	25.000.000	8.762.765	
7	Pembangunan Landscape & sarana Penunjang Gedung DPPKAD	3.325.059.000	3.156.742.631	
V	<i>Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah</i>	6.815.749.940	5.941.279.709	
1	Penyusunan analisa standar belanja	200.000.000	185.480.000	
2	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah & retribusi	50.000.000	46.713.217	
3	Penyusunan sistem informasi keuangan daerah	150.000.000	134.620.000	
3	Pengelolaan administrasi gaji	210.000.000	95.925.545	
4	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan asli daerah	105.955.000	104.820.000	
5	Percepatan pemasukan PBB dan intensifikasi Pajak Daerah	478.265.840	388.840.080	
5	Verifikasi dan pengesahan DPA	50.000.000	31.191.250	
6	Pengelolaan keuangan Daerah	3.070.000.000	2.870.683.614	

7	Penyusunan Perda dan Perbup tentang APBD Kabupaten Temanggung	800.000.000	712.540.970	
8	Pengelolaan Barang Milik Daerah	152.000.000	118.161.293	
9	Verifikasi RKA	60.000.000	26.716.000	
10	Pendataan Massal SISMIOP Objek/Subjek PBB-P2	548.710.950	459.738.882	
11	Pengelolaan Administrasi Pajak Daerah	363.761.550	341.903.094	
12	Penelusuran, Penagihan dan Penanganan Permasalahan Pajak Daerah	34.060.000	31.844.164	
13	Pembinaan Pejabat Pengurus Barang	300.000.000	285.406.000	
14	Analisis Kebutuhan dan Inventaris Barang Milik Daerah	35.000.000	31.177.500	
15	Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	112.997.000	33.572.200	
16	Pemeliharaan SIMBADA	19.999.600	19.543.500	
17	Lelang tanah bekas bengkok kelurahan	50.000.000	26.057.400	
18	Reviuw perda pengelolaan keuangan daerah	25.000.000	21.235.000	
VI	<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur</i>	<i>90.000.000</i>	<i>74.976.764</i>	
1	Penyediaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Non PNS (bagi	90.000.000	74.976.764	

	PTT dan			
VII	<i>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah</i>	303.296.000	235.153.000	
1	Peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah	176.000.000	122.417.000	
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	57.775.000	11.912.000	
3	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan	69.521.000	66.873.000	
	JUMLAH KESELURUHAN	12.352.436.675	10.937.897.170	

BAB IV

PENUTUP

A. Tinjauan Umum atas capaian kinerja

Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung sebagai SKPD teknis yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, mengoordinasikan, dan melaksanakan urusan pemerintah di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah. Agar pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut berjalan secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana, dan sarana secara efektif dan efisien mungkin.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa BPPKAD dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil, karena semua target sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori (**Baik**). Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

- a. Realisasi Pendapatan Asli Daerah yaitu Rp308.700.246.703 dari yang ditargetkan sebanyak Rp307.083.335.256
- b. ada Realisasi anggaran Penatausahaan SKPD terhadap Total belanja langsung SKPD dalam 1 (satu) tahun mengalami penurunan target anggaran dikarenakan untuk efisiensi anggaran.

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah di Masa mendatang antara lain ;

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan. Perencanaan tahapan pelaksanaan kegiatan
2. Pembangunan dilakukan lebih awal dan cermat segera setelah APBD ditetapkan.

3. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar Bidang-bidang yang ada di Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah.
4. Meningkatkan pola komunikasi dan koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan pada masyarakat sehingga berdampak pada peningkatan pendapatan daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan aset daerah
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Demikian laporan akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah Tahun 2017 untuk Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten Temanggung, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Sekian dan terima kasih

Temanggung, Februari 2018
Kepala Badan PPKAD,

Ir. KRISTRI WIDODO, MSi.
Pembina Utama Muda
NIP : 19661211 199403 1

Lampiran 1

Pengukuran Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target
1	2		3	4
1	Meningkatnya kapasitas kemampuan keuangan dan pengelolaan keuangan daerah	1 2 3 4	1 Persentase Anggaran penatausahaan SKPD terhadap Total Belanja Langsung SKPD dalam 1 (satu) Tahun 2 Rasio realisasi pendapatan daerah terhadap potensi pendapatan daerah 3 Rasio pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah 4 Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah	25 0,87 9 WTP
2	Meningkatnya tertib administrasi aset	1	Presentasi tertib administrasi aset daerah di SKPD	68

